

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG
BARAT NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PEKON TERTIB
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Lampung Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**DEVI OKTAVIA
NPM. 1721020016**

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2021M

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG
BARAT NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PEKON TERTIB
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Lampung Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

DEVI OKTAVIA

NPM : 1721020139

Program Studi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S. Sos., M.H.

Pembimbing II : Eko Hidayat. S.Sos., M.H.



FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2021 M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 tahun 2019 tentang Pekon Tertib dan untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 tahun 2019 tentang Pekon Tertib. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam hal ini menganalisa perspektif *fiqh siyasah* dan menjelaskan tingkat pelaksanaan perbup pada Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat dan pembinaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, apakah pekon tersebut tertib.

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden yakni Satuan Polisi Pamong Praja yang memberikan pembinaan pekon dalam penerapan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 tahun 2019 tentang Pekon Tertib, Peratin, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat pekon Way Empulau Ulu, serta data penunjang diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 tahun 2019 Tentang Pekon Tertib telah berjalan dengan baik sejak disahkan 2 tahun yang lalu tetapi menjadi kurang maksimal yang disebabkan antara lain: Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ketertiban umum dan ketenteraman, Kegiatan yang dilaksanakan tidak menyentuh langsung kepada masyarakat dan aparatur pekon, tidak adanya dana operasional dan sumber daya manusia. Pandangan *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pekon Tertib Satpol PP Kabupaten Lampung Barat belum maksimal dalam membina menjalankan tugas *Sultah Tanfiziyyah* dan *Muraqabah wa Taqwim* karena belum adanya pekon yang dapat dinyatakan menjadi pekon tertib dan masih ditemukannya pelanggaran atas perbup ini, Prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tanggung jawab pemerintah dan berprinsip adil semua dilaksanakan semata-mata untuk mewujudkan ketertiban umum di Lampung Barat setiap yang melanggar diberikan Pembinaan walaupun tidak semua pekon memenuhi unsur tertib dikarenakan oleh faktor-faktor penghambat sehingga tidak maksimalnya pembinaan.

Kata Kunci: Pekon, Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 tahun 2019 Tentang Pekon Tertib.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Tlp (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengatakan bahwa:

Nama : Devi Oktavia
Npm : 1721020016
Jurusan/Prodi : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pekon Tertib Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Barat)."** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 6 September 2021

Pepulis



Devi Oktavia

1721020016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jalan Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: **Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pekon Tertib Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Lampung Barat)**

Nama : **Devi Oktavia**
Npm : **1721020016**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas
Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H
NIP. 197611042005011004


Eko Hidayat, S.Sos., M.H
NIP. 197512302003121002

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah


Frenki, M.Si
NIP.198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pekon Tertib Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Lampung Barat)"** disusun oleh: **Devi Oktavia, NPM. 1721020016**, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) telah diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa 9 November 2021 pukul 11.00-13.00 WIB.

Tim Penguji

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., MHI

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

Penguji III : Eko Hidayat, S.Sos., M.H

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. A KUMEDIJA FAR, S.Ag., M.H

NIP. 197208262003121002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء : ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, makaKembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamubenar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itulebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

(QS. An-nisa (4) : 59)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, Alm Ayahanda Lukman dan Ibunda Asmani tercinta yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa, serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do'a restunya penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Ketiga abang dan kakakku Helmi, Mirson dan Selamat Arto yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukungku.
3. Kakak ipar Herlina dan Nika Helma Rosa yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
4. Pangah Hamsyah dan Mangah Nur Asni yang sudah seperti ibu bapak ke 2 bagi saya, keponakan, sepupu dan seluruh keluarga besar yang selalu senantiasa memberikan support, mengasuh dan mendidik saya.
5. Teman-teman seperjuangan Anggi Febriyani, Dwi Fatmawati, Lukman, Maharani Nur Safitri, Raharti, Rian Andrianto, dan seluruh teman temanku jurusan siyasah angkatan 2017 kelas C yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi.
6. Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Devi Oktavia dilahirkan di Kota Besi pada tanggal 15 Oktober 1999, merupakan anak bungsu dari empat bersaudara merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Alm Lukman dan Ibu Asmani. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Besi dan diselesaikan pada tahun 2011, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS N) 1 Lampung Barat selesai tahun 2014, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung Barat Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) selesai tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung mengambil program studi Siyasa Sar'iyyah (Hukum Tata Negara).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT dan segala syukur penulis panjatkan kepada-Nya atas rahmad-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan kepada baginda Muhammad SAW dan kepada keluarganya yang suci serta kepada para sahabatnya yang telah membawa risalah agama Islam yang sampai pada saat ini masih menjadi panutan bagi umatnya sampai akhir zaman kelak.

Adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya penulis sangat menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan dan kesalahan, baik dari penulisannya maupun dalam mengungkapkan pendapat dari para pakar dibidangnya. Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini yakni dengan membimbing, mengarahkan, memotivasi, memberikan saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama ungkapan terimakasih penulis ucapkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Mukri, M.Ag, Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A.Khumaidi Ja'far, MH, Selaku dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, MH, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, MH, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr Relit Nur Edi, M.Kom.I, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah.
6. Bapak Harto Wibowo SE, MM, Selaku Kabag TU Fakultas Syariah.
7. Bapak Frenki, M.S.I, Selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.
8. Bapak Drs. Liky Faizal, S.Sos., M.H Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Eko Hidayat S.Sos., M.H, Selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
11. Ayah dan Ibu semua anggota keluargaku yang selalu mendukung setiap langkahku serta doa yang tak pernah berhenti dihatirkan disetiap sujudmu.
12. Teman-teman penulis, Anggi Febriyani, Anggun Yuli Saputri, Desi Fitriani, Dwi Fatmawati, Lukman, Luluk Ayu Saputri, Maharani Nur Safitri, Marcela, Mira Pariska,

Putri Retno Mutia, Rahari, Rian Andrianto dan seluruh teman-temanku jurusan siyasah angkatan 2017 kelas C yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

13. Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 9 November 2021

Penulis

Devi Oktavia

NPM. 1721020016



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	1
C. Fokus dan Sub Fokus Masalah	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	4
H. Metode Penelitian.....	5
I. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI TINJAUAN UMUM PEKON TERTIB	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	9
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	11
B. <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	12
2. Prinsip-prinsip <i>Fiqh Siyasah</i> dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah.....	16
C. Kebijakan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	17
D. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pekon Tertib	19
BAB III OBJEK PENELITIAN	
A. Pekon Way Empulau Ulu	23
1. Profil Pekon Way Empulau Ulu	24
2. Visi Misi Pekon Way Empulau Ulu.....	24
3. Lembaga Pemerintah	24
4. Lembaga Pendidikan	24
B. Gambaran Umum dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat	24
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	24
2. Sumber Daya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	26
3. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Lampung Barat	30
C. Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pekon Tertib.....	33
BAB IV ANALISA DATA	
A. Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pekon Tertib (Studi di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Lampung Barat)	37
B. Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pekon Tertib	38

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran	41

DAFTAR RUJUKAN..... 43

- A. Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- B. Surat Rekomendasi Izin dari Satuan Polisi Pamong Praja
- C. Panduan Wawancara
- D. Turnitine
- E. Blangko Konsultasi Skripsi



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Kepala dan Pemangku Pekon Way Empulau Ulu.....	23
Tabel 3.2 Lembaga Pemerintaha Pekon Way Empulau Ulu	24
Tabel 3.3 Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Pangkat/ Golongan	26
Tabel 3.4 Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Tingkat Pendidikan.....	27
Tabel 3.5 Formasi Jabatan Struktural/ Fungsional Satpol PP Kabupaten Lampung Barat.....	27
Tabel 3.6 Data Asset daerah yang dikelola Satpol PP	28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lampiran 2 Surat Rekomendasi Izin dari Satuan Polisi Pamong Praja

Lampiran 3 Panduan Wawancara

Lampiran 4 Turnitine

Lampiran 5 Blangko Konsultasi Skripsi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian yang akan dilakukan adalah berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pekon Tertib Perspektif *Fiqh Siyasah*”** Untuk menghindari kesalahan dan memahami judul tersebut, maka perlu adanya penjelasan dari istilah-istilah yang terkandung dalam judul ini, adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Implementasi perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹
2. Peraturan Bupati adalah jenis peraturan perundang-undangan, akan tetapi pergub baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.²
3. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 tahun 2019 adalah peraturan yang mengatur dengan tegas tentang ketentraman dan ketertiban umum desa. Dimana tercantum unsur, penilaian dan penghargaan untuk desa yang tertib.³
4. Pekon tertib adalah suatu keadaan dinamis dalam lingkungan pekon yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah pekon serta masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur.⁴
5. Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual melalui sudut pandang untuk melukiskan suatu objek atau masalah berdasarkan sifat atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.⁵
6. *Fiqh Siyasah* adalah usaha sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁶

Beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari skripsi ini adalah suatu penelitian secara ilmiah terhadap Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib yang berisi aturan dan larangan kepada masyarakat dan yang menjadi objek penelitiannya adalah Pekon Way Empulau Ulu dan pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Barat.

B. Latar Belakang Masalah.

Islam merupakan agama yang sempurna dan mengajarkan tentang bagaimana menjalani kehidupan dalam segala aspek sehingga tidak mengganggu hak orang lain yang dapat mengakibatkan

¹ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (2).

³ Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pekon Tertib.

⁴ Ibid, Pasal 1 Ayat (7).

⁵ A Ahmad Sanusi, M. A, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta Rajawali Pers, 2015), 81.

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2000), 42.

kemudharatan. Termasuk dalam hal kemestian mentaati Allah dan Rasulullah, dan *Uli al-Amr* (pemegang kekuasaan) yang sudah diatur dalam Al-Qur'an surat An Nisa Ayat 59, Berikut dalil dan terjemahannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء : ٥٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁷

Maksud dari *ulil al-Amr* dalam ayat tersebut yakni pemegang kekuasaan seperti para pemimpin dan para ilmuwan. Apa yang ditetapkan oleh ulil amri wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi umat dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat.⁸

Kemudian taatlah juga pada *ulil amri*, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali bagi manusia dalam kebutuhan juga kemaslahatan umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib menaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasulullah yang mutawatir dan dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.

Apabila *Ahlu 'I-Halli wa 'I-Aqdi* dari kaum mu'minin telah ber-*ijma'* (sepakat) atas suatu urusan di antara kemaslahatan-kemaslahatan umat yang tidak ada *nash*-nya dari Allah, kemudian di dalam hal itu mereka bebas memilih dalam arti tidak terpaksa, maka menaatinya adalah wajib.⁹

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan pemerintah Daerah sebagai Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam ketentraman dan ketertiban umum antara lain meliputi:

1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota;
2. Penegakan Perda Kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota;
3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.¹⁰

Kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005)

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 41.

⁹ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1986),

perlindungan masyarakat.¹¹ Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah tersebut, pemerintah Lampung Barat membentuk Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2019 tentang Pekon Tertib.

Berdasarkan Perbup Lampung Barat No. 41 tahun 2019 tentang Pekon Tertib, terdapat 11 unsur tertib antarlain:

1. Tertib pelaksanaan siskamling
2. Tertib pemanfaatan, angkutan jalan
3. Tertib saluran hijau, taman kota dan tempat umum
4. Tertib sungai, situ/danau, dan saluran air
5. Tertib usaha/ berjualan
6. Tertib bangunan
7. Tertib pemilik dan penghuni bangunan
8. Tertib sosial
9. Tertib penyelenggaraan kesehatan
10. Tertib kawasan tanpa rokok
11. Tertib administrasi

Keadaan tatanan sosial yang seimbang akan menciptakan suasana aman dan tertib yang merupakan jaminan terpenuhinya segala kebutuhan manusia, tercapainya 11 ketentraman dan ketertiban tersebut hanya dapat terjadi apa bila berjalan dengan efektif, ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran pemerintah, pelaksanaan dan pembangunan serta pembinaan ketentraman dalam suatu wilayah daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Faktanya, Kabupaten Lampung Barat memiliki 131 pekon dimana semua pekon telah melaksanakan tetapi tidak ada satupun yang dapat dinyatakan sebagai pekon tertib karena tidak memenuhi unsur padahal Satpol PP telah membina 15 pekon termasuk pekon Way Empulau Ulu yang masih banyak terdapat pelanggaran akan Peraturan Bupati Lampung Barat No 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib disebabkan kurangnya pemahaman dan ketidakpatuhan akan Perbup ini. Sehingga pengamatan awal peneliti terdapat dugaan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tidak membina secara maksimal dalam implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang pekon tertib.

Menurut dugaan tersebut penyusun tertarik untuk meneliti serta menganalisis dalam perspektif *fiqh siyasah* dan menjelaskan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Lampung Barat)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Lampung Barat).

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 255.

Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib Perspektif *Fiqh Siyasah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus dan sub fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib?

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang mendorong dan memotivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi pekon tertib menurut Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 tahun 2019 tentang Pekon Tertib.
- b. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah* Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 tahun 2019 tentang Pekon Tertib.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan, kesadaran masyarakat akan kepatuhan dan meningkatnya upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan terhadap Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 tahun 2019 tentang Pekon Tertib sehingga akan terciptanya masyarakat di pekon yang tertib.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pengetahuan yang baru.
- b. Untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) di jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan penulis menyadari bahwa secara substansial penelitian ini sama sekali tidak baru. Pada kajian penelitian terdahulu yang relevan, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya antara lain sebagai berikut:

Skripsi karya Desi Tamara yang berjudul “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini membahas tentang pembentukan dan pelaksanaan tugas Satpol PP yang bertujuan untuk menegakkan peraturan daerah dan juga menjaga ketertiban umum.¹²

¹² Desi Tamara, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 63.

Penelitian karya Riska Destianita yang berjudul upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan dan gelandangan di Kota Samarinda (studi kasus larangan memberi uang kepada anak jalanan dan pengemis), penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikatakan belum berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya kerjasama oleh Dinas-Dinas di Samarinda yang bekerja secara terpisah sehingga pelaksanaan menjadi terhambat dan susah untuk diterapkan di masyarakat Kota Samarinda.¹³

Jurnal ilmiah penelitian karya I Komang Subagiarta yang berjudul “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan kawasan jalur hijau di Kabupaten Klungkung”. Dalam penelitian ini menjelaskan dalam penegakan peraturan kawasan jalur hijau di Kabupaten Klungkung mengalami kendala yakni peraturan itu sendiri. Artinya, peraturan polisi pamong praja tidak bisa bertindak sepenuhnya dalam penegakan hukum peraturan kawasan jalur hijau di Kabupaten Klungkung. Hal ini karena, Satuan Polisi Pamong Praja hanya memiliki fungsi pengendalian dan pembinaan, tetapi tidak untuk menindaklanjuti secara hukum. Kendala lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan yang berkaitan dengan daerah jalur hijau dan kurangnya personil yang melakukan kegiatan permukiman, pembinaan dan penertiban bahwa kadang-kadang hasil yang diperoleh kurang maksimal.¹⁴

Dari beberapa skripsi maupun hasil penelitian diatas maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan skripsi ini dari hasil-hasil sebelumnya adalah membahas salah satu variabel yang digunakan dalam membahas pokok permasalahannya, yakni variabel Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan perbedaan antara skripsi ini dengan hasil-hasil sebelumnya adalah pada peraturannya, dalam hal ini kajiannya lebih difokuskan membahas mengenai Pembinaan Pekon Tertib yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat

- a. Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian ini termasuk data penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondiasi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁵ Penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif dan mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang dan

¹³Riska Destianita “Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Di Kota Samarinda (Studi Kasus Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis)”, *eJurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 8, No.2, (2020): 535-544 ejournal.ipfisip-unmuk.ac.id

¹⁴I Komang Subagiarta, “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan kawasan jalur hijau di Kabupaten Klungkung”, *Jurnal Ilmiah fakultas hukum, Universitas Warmadewa Denpasar*, Vol. 1, No 2, (2020): 393-398, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jo-Kunhum>.

¹⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga masyarakat.¹⁶ Dalam hal ini menjelaskan tingkat pelaksanaan pekon tertib.

- b. Adapun Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan juga menguraikan data yang telah ada, kemudian dapat memperoleh kesimpulan.¹⁷ Melalui metode deskriptif analisis ini akan digambarkan bagaimana pelaksanaan Pekon Tertib perspektif *fiqh siyasah*.

2. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik perorangan atau organisasi.¹⁸ Data diperoleh dari: Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Barat, Peratin, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat Pekon Way Empulau Ulu.
- b. Data sekunder yaitu bahan yang berisikan informasi yang menjelaskan dan membahas tentang bahan primer. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis.¹⁹ Antaralain: Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib, buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, ensiklopedia dan lainnya.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁰ Dalam hal ini populasinya adalah seluruh Pekon di Lampung Barat yang berjumlah 131 Pekon.

b. Sampel Penelitian

Sampel yaitu sekumpulan atau sebagian dari populasi yang diperoleh melalui proses *sampling* tertentu, jika jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10% 15% 20% dan 25%.²¹ Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.²² Yaitu, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Peratin beserta aparaturnya Pekon Way Empulau Ulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Sopiah Etta Mamang Sanggaadji, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2010), 24.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), 126.

¹⁸ Zeni Yusalis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 6.

¹⁹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 8.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 112.

²¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 109-112.

²² Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), 155.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan menggunakan analisis isi deskriptif studi dokumentasi, yaitu menelusuri berbagai literatur yang mengandung informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.²³

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.²⁴ Melakukan tanya jawab kepada sasaran penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat dari informan dan responden melalui kuisioner. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil. Wawancara ditujukan kepada informan mengenai masalah yang diteliti terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib, yaitu Pejabat Fungsional, Anggota Bidang Linmas di Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Barat, Peratin, Bidan, Kasi Teknis Pembangunan, Bhabinkamtibnas, Babinsa, Kaur Perencanaan, Kasi Teknis Pemberdayaan Pekon Way Empulau Ulu.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran untuk menangkap gejala yang diamati.²⁵ Dalam hal ini penulis melihat secara langsung kondisi di lapangan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.²⁶ Dokumentasi yang penulis gunakan untuk memperoleh data tentang pekon tertib di Lampung Barat.

5. Pengelolahan Data

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam pertanyaan yang telah diselesaikan.²⁷
- b. Rekontruksi data (*Rekontruicing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami.

²³ Conny R, Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Grasindo,2004), 20.

²⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 85.

²⁵ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

²⁶ Arikunto, *Prosedu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 247.

²⁷ Ibid, 236.

- c. Sistematika Data (*Sistemizing*), bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁸ Dengancara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²⁹

6. Analisis Data

Analisa data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis yakni menggunakan deskriptifyaitu mengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap *fiqh siyasah*, peraturan yang berkaitan dengan keteritiban dan literatur lainnya yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah penelitian.³⁰ Kesimpulan akhir menggunakan tehnik berfikir deduktif yaitu, metode yang bersifat umum kemudian dari kata yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³¹

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini dibuat sistematika yang diharapkan akan lebih mudah untuk di pahami. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang dimana setiap bab mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum gambaran sistematikannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN memaparkan latar belakang masalah, pengambilan masalah yang akan dijadikan fokus dan sub fokus utama dalam penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukan penelitian, manfaat penelitian yang dilakukan, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu, metode yang dilakukan dalam penelitian ini dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI memaparkan teori tentang *fiqh siyasah*, Kebijakan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib serta penegakkannya.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, gambaran umum objek yang diteliti, penyajian data penelitian disertai dengan pembahasan yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang disusun.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN memaparkan hasil analisis data penelitian dan temuan yang dilakukan peneliti.

BAB V PENUTUP memaparkan kesimpulan penelitian yang dilakukan disertai dengan saran-saran untuk pembaca maupun peneliti selanjutnya yang berminat.

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 153.

²⁹ Amirullah, Zainal Abisin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

³⁰ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 17.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research Andi Offset*, (Yogyakarta: 1990), 28.

BAB II KAJIAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh Siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan *al-siyasi*. Kata *fiqh* secara bahasa bermakna faham. Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil lebih terperinci.³² Kata *fiqh* mempunyai arti paham atau memahami seperti dalam firman Allah:

لَرَجَمَنَّكَرَهْطًاوَلَوْلَا ضَعِيفَا فِينَا لَنَرَنَّكَوَاِنَّا تَقُولُ مِمَّا كَثِيرًا نَفْقَهُ مَا يُشْعِبُ قَالُوا

(بِعَزِيزٍ عَلَيْنَا أَنْتَ وَمَا سُورَةُ هُود: ٩١)

Artinya: "Mereka berkata: "Hai, Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang uang berwibawa di sisi kami." (Q.S Hud 11:91). *Fiqh* juga bermakna ilmu sebagaimana firman Allah:

فِي لَيْتَفَقَّهُوَا طَافَةً مِنْهُمْ فِرْقَةٍ كُلِّ مِنْ نَفَرًاوَلَا كَافَّةً لِيَنْفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ كَانُوا مَا

يَحْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ رَجَعُوا إِذَا قَوْمُهُمْ وَلِيْنَدِرُوا الدِّينَ (سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٢٢)

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (Q.s at-Taubah(9):122).³³

³²Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 2.

³³ Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pelita III, 1982/1983), 206.

Dari ayat diatas, tampak jelas bahwasanya pengertian *fiqh* lebih mengarah pada suatu ilmu pengetahuan agama yang memiliki sifat secara umum meliputi berbagai aspeknya. Sementara dalam kajian *ushul fiqh*, *fiqh* adalah “pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang sifatnya amaliah yang digali dari dalil-dalil yang lebih rinci”. Pengertian ini menunjukkan bahwasanya *Fiqh* adalah hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan para ulama lewat kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung di dalam Al-Qur’an dan Sunnah.³⁴

Dalam kutipan Amir Syarifuddin, menurut Imam Al-Tirmizi menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” yang memiliki pengertian mengetahui batinnya sampai kedalamannya.³⁵ Sudah diungkapkan sebanyak 20 kali kata “*Fuqaha*” dalam Al-Qur’an, 19 diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang telah berbentuk pasti (*qath’i*), *fiqh* merupakan “ilmu” mengenai hukum yang tidak pasti (*zanni*).³⁶

Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata *al-siyasi* yang artinya adalah mengatur.³⁷ Secara *etimologis* (bahasa) kata *siyasah* merupakan bentuk *masdar* (asal) dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan”.³⁸ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³⁹

Dilihat dari segi *terminologi* (istilah) *siyasah* ialah seluruh perilaku yang mengantarkan manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhi dari kejelekan, sekalipun Rasulullah tidak menentukannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya. Adapun kata *siyasah* disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum islam antara lain yaitu:⁴⁰

- a. Menurut Ibnu Manzhur, menurut beliau *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.⁴¹
- b. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, menurut beliau definisi dari *siyasah* yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.⁴²
- c. Menurut Abdurrahman, menurut beliau *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.⁴³

³⁴Toha Ansiko, “Pemberdayaan Qaw’aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *jurnal al-adalah*, Bandar Lampung: Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Vol. 12, No. 1, 2014, (2019): 105-106, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/32>.

³⁵Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), 15.

³⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 3.

³⁷Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 21.

³⁸Ibid, 24.

³⁹Ibn Mansur, *Lisan al-‘Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108.

⁴⁰Imam Amrusi Jailani, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7.

⁴¹H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45.

⁴²Amrusi Jailani, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*, 8.

⁴³Ibid., 8.

- d. Menurut Husayn Fawzi al-Najjar, *siyasah* berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin tercapainya kebaikan bagi mereka.⁴⁴
- e. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah, *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kebiasaan. Meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Allah SWT.⁴⁵

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama islam dikelompokkan ke dalam pranata sosial Islam. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* membicarakan antara lain tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawabkan kekuasaannya.⁴⁶

Dengan demikian dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴⁷

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyasah*, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah*. Seperti Imam al-Mawardi ahli *Fiqh* Mazhab Syafi'i dan negarawan pada masa dinasti Abbasiyah, dalam kitab *fiqh siyasah*nya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* yang membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* ke dalam lima bagian antara lain: politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), politik moneter (*Siyasah Maliyah*), politik peradilan (*Siyasah Qala'iyah*), politik peperangan (*Siyasah Harbiyah*) dan politik administrasi (*Siyasah 'Idariyah*).⁴⁸

Sedangkan menurut T.M Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* ke dalam delapan bagian, diantaranya:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan tentang perintah perundang-undangan
- b. *Siyasah Tasri'iyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum
- c. *Siyasah Qadaiyyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan peradilan
- d. *Siyasah Maliyyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter
- e. *Siyasah Idariyyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan administrasi Negara
- f. *Siyasah Dauliyah/ Siyasah Khariyyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional

⁴⁴ Ahmad Sukardja dan Muzar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih dan kanun* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 95-96.

⁴⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: al-Muassasah al-'Arabiyyah, 2002), 16.

⁴⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3.

⁴⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran*, 26.

⁴⁸ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006), 4.

- g. *Siyasah Harbiyah Shar'iyah* yaitu politik peperangan
 h. *Siyasah Tanfidziyyah Shar'iyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang.⁴⁹

Menurut Imam Ibnu Taimiyyah, dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* terbagi atas tempat bagian yaitu *Siyasah Qala'iyah* (peradilan), *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi Negara), *Siyasah Maliyyah* (politik moneter) *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah* (hubungan Internasional).

Menurut Abd al-Wahab Khalaf yang lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian dalam ruang lingkup *fiqh siyasah*, yaitu *siyasah Qadla'iyah* (peradilan), *Siyasah Dauliyyah* (hubungan internasional), *Siyasah Maliyyah* (keuangan negara).⁵⁰

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang disiplin ilmu *fiqh* yang memiliki sumber-sumber kajian yang dapat dijadikan pedoman umat manusia. Secara umum sumber *fiqh siyasah* terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder.

Fathiyah Al-Nabrawi membagi sumber-sumber *fiqh siyasah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.⁵¹ Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan yang membuat kajian *fiqh siyasah* menjadi studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Berdasarkan penjelasan beberapa pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah* di atas maka dapat diketahui dalam pembahasan skripsi ini masuk dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyyah*.

B. *Siyasah Dusturiyyah*

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu *siyasah* itu sendiri serta *dusturiyyah*. Arti *siyasah* dapat dilihat di pembahasan di atas, sedangkan *dusturiyyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum *siyasah dusturiyyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.⁵² Menurut istilah, *dustur* artinya kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (*konstitusi*) dan yang tidak tertulis (*konvensi*).

Dalam buku *fiqh siyasah* karangan J. Suyuti Palungan definisi dari *Siyasah Dusturiyyah* adalah hal yang mengatur warga negaranya. Hal ini berarti kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *siyasah dusturiyyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dalam suatu negara, yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negara.⁵³

⁴⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 30.

⁵⁰ Ibid., 13

⁵¹ Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Islamiyyah* (Kairo: Matba'ah al-Qahirah al-Jadidah), 12-27.

⁵² Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38.

⁵³ Suyuti Palungan, *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran*, 39.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, didalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang ditentukan oleh *hal ikhwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁴

Di dalam pembahasan Syari'ah digunakan istilah *fiqh dusturiy*, yang dimaksud dengan *dusturiy*, adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturn-peraturannya dan adat istiadatnya. Abu A'laal-Maududi menakrifkan dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.⁵⁵

Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang di sebutkan dalam Al-Qur'andan yang di jelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁵⁶ Baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun sunnah Nabi, *maqashid syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁷

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok; pertama, dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits, *maqasid syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulli* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁸ Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah adalah:

1. *Al-sulthah Al-Tasyri'iyah*

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *Al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islama dalam mengatur masalah kenegaraann yang meliputi persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 48.

⁵⁵ Imam Amrusi Jailani, *et. al. Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Iain Sunan Ampel Press, 2014), 22.

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ahmad Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 47-48.

⁵⁸ Ibid.

muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *Al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.⁵⁹

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuainya dengan ketentuan yang terdapat dalam *nash*. *Ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dengan spirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintah.⁶⁰

2. *Al-sulthah al-tanfidiyyah*

Al-sulthah al-tanfidiyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waaliu al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam ketata negaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem Presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 162.

⁶⁰ Ibid, 48.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

3. *Al-sulthah Al-Qadha'iyyah*

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas untuk wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.⁶¹

Tugas *Al-sulthah al-qadha'iyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.⁶²

4. *Siyasah Idhariyyah*

Pembahasan terkait dengan *siyasah* ini adalah meliputi pembahasan tentang administrasi dan kepegawaian. Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada Negara, hal ini disebabkan oleh:

- a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah

⁶¹ Ibid, 163.

⁶² Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), cet ke-1, 273.

perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah.⁶³ Sedangkan para fuqaha/ulama menitik beratkan perhatian dan penyelidikan kepada hal-hal praktis.

- b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- c. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).⁶⁴
- d. Fakta sejarah islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepada negara, oleh karena itu logis sekali apabila para *fuqaha* memberikan perhatiannya yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang kenegaraan lainnya.⁶⁵
- e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara lainnya.⁶⁶

2. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah

Al-Qur'an merupakan dasar yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam *siyasah* mengutip dari Suyuti Pulungan dalam bukunya Beni Ahmad Saebeni, diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁷

a. Kedaulatan tertinggi di Tangan Allah SWT

Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh tidak hanya ditunjukan kepada Allah semata-mata dan semua umat-Nya wajib mengikuti segala kebijakannya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan yang utama kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada *ulil amri* diantara orang-orang yang beriman, selama *ulil amri* tersebut tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam manusia yaitu rakyat mempunyai persamaan hak di depan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya, seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58:

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَتَوَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

⁶³ Muchtar Affandi, Ilmu-Ilmu Kenegaraan, Alumni, Bandung, 1971, 157.

⁶⁴ Ahmad Djazuli, Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah", (Jakarta: Kencana, 2004), 49.

⁶⁵ Ibid, 49.

⁶⁶ Wirjonno Projodikoro, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, (Bandung: PT.Eresco, 1971), 17-18.

⁶⁷ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 124-131

﴿بَصِيرًا سَمِيعًا﴾ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا إِنَّ سُورَةَ النَّسَاءِ: ٥٨)

Artinya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknyaku kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

c. Prinsip Persamaan (*Musawah*)

Semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bahasa dan bangsa. Dijelaskan dalam suray Al-Hujarat ayat 10, Allah SWT berfirman:

﴿تَرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَأَصْلَحُوا﴾ إِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا (سُورَةُ الْحَجَرَاتِ: ١٠)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikan antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

d. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara merupakan tolak ukur dari dilaksanakan sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Seperti dalam Al-Qur’an surat Asy-Syura ayat 38, Allah SWT berfirman:

﴿يُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةُ وَأَقَامُوا الرِّيْءَ اسْتَجَابُوا لِلَّذِينَ﴾ (سُورَةُ الثَّوْرَى: ٣٨)

Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan Melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka”.

C. Kebijakan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Kepala Daerah

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsru penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁶⁸ Dapat diartikan bahwa kepala daerah merupakan pemerintah di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintah di daerah yang meliputi Kepala Daerah adalah Gubernur (Kepala Daerah Provinsi), Bupati (Kepala Daerah Kabupaten), atau Wali Kota (Kepala Daerah Kota).

Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kekuasaan yang di miliki oleh pemerintah. Pada negara-negara yang menganut paham demokrasi, pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat di pahami setidaknya dalam dua pengertian. Pertama pemerintah dalam arti luas (*in the broad sense*) kedua, pemerintah dalam arti sempit (*in the narrow*

⁶⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1

sense). Dalam arti luas pemerintah mencakup semua alat-alat kelengkapan negara yang sering juga lembaga-lembaga negara. Dalam trias politika dikenal dengan tiga lembaga negara, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintah dalam arti luas mencakup ketiga kelembagaan tersebut. Sedangkan dalam arti sempit yang disebut dengan pemerintah hanyalah kekuasaan eksekutif semata.⁶⁹

2. Tugas dan Wewenang kewajiban Kepala Daerah

Pemerintah Daerah Dalam menjalankan roda pemerintahan gubernur, bupati, wali kota memiliki kewajiban mengatur tugas dan wewenang guna menjalankan tata tertib dan terselenggaranya pemerintahan daerah di antaranya memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian ditetapkan kebijakan bersama DPRD.

Tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah telah disebutkan dalam Paragraf ketiga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah dalam pasal 65 yang menjelaskan kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala daerah berwenang:

- a. Mengajukan rancangan perda
- b. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- c. Menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat dan
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah yang sedang menjalani tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya yang dimiliki seperti yang disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) diatas. Dalam hal

⁶⁹ Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persa, 2011), 51.

ini kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara di gantikan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

3. Penetapan dan Kedudukan Peraturan Kepala Daerah

Dalam hal penetapannya, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah termuat dalam pasal 5, sebagai berikut:

- a. Keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh kepala daerah, harus diumumkan dalam berita daerah.
- b. Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penertiban resmi pemerintah daerah untuk mengumumkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah tertentu
- c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah tertentu kepada masyarakat.

Peraturan kepala daerah, yang di dalam UU No. 22 Tahun 1999 disebut Keputusan Kepala Daerah, pada dasarnya sama. Penyebutan Peraturan Kepala Daerah bertujuan untuk memperjelas bahwa keputusan kepala daerah yang dimaksud, berisi ketentuan peraturan (keputusan yang bersifat *in abstracto*). Hal ini untuk mencegah timbulnya kerancuan dengan keputusan kepala daerah yang bersifat *inkonkrito* (keputusan berkenaan objek tertentu atau tidak bersifat mengatur secara umum).

Untuk melaksanakan suatu Perda, kepala daerah berdasarkan kuasa undang-undang, menetapkan Peraturan Kepala Daerah, sama halnya dengan Perda, Peraturan Kepala Daerah juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Kepala Daerah baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam berita daerah oleh Sekretaris Daerah.

D. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pekon Tertib

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan ketentraman dan ketertiban masyarakat di lingkungan pekon.

Maksud dibentuknya pekon tertib dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 antara lain:

- a. Sarana edukatif di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Sarana pengembangan kemandirian dan perilaku masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban;
- c. Sarana pelaksanaan ketertiban di pekon yang berbasis masyarakat; dan
- d. Sarana percepatan pelaksanaan program pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban.

Pasal 4 menjelaskan bahwa bagi pekon yang memenuhi unsur sebagai pekon tertib diberikan penghargaan. Unsur sebagai pekon tertib Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang pekon tertib meliputi:

- a. Tertib pelaksanaan siskamling dengan indikator sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana poskamling; dan
2. Terlaksananya kegiatan siskamling
- b. Tertib pemanfaatan dan angkutan jalan dengan indikator sebagai berikut:
 1. Tertib pemanfaatan jalan dengan tidak menggunakan jalan, bahu jalan dan drainase untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 2. Warga dan pemilik angkutan jalan telah memperhatikan tentang keselamatan dan aturan lalulintas
- c. Tertib saluran hijau, taman kota dan tempat umum dengan indikator sebagai berikut:
 1. Memelihara jalur hijau, taman kota dan tempat umum; dan
 2. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu jalur hijau, taman kota dan tempat umum.
- d. Tertib sungai, situ/danau, dan saluran air/drainase dengan indikator sebagai berikut:
 1. Tidak membuang sampah di sungai, situ/danau, dan saluran air/drainase; dan
 2. Tidak menangkap ikan menggunakan setrum, bahan peledak dan bahan beracun.
- e. Tertib usaha/berjualan dengan indikator sebagai berikut:
 1. Tidak berjualan di tempat-tempat yang dilarang untuk berjualan; dan
 2. Tidak berjualan atau menyediakan barang-barang yang bersifat pornografi; dan
 3. Tidak menjual minuman keras tanpa izin
- f. Tertib bangunan dengan indikator sebagai berikut:
 1. Tidak mendirikan bangunan di tempat-tempat yang dilarang untuk mendirikan bangunan; dan
 2. Mendirikan bangunan sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB).
- g. Tertib pemilik dan penghuni bangunan dengan indikator sebagai berikut:
 1. Pemilik bangunan telah memelihara bangunan dan halamannya sehingga tidak mengganggu ketertiban umum; dan
 2. Pemilik bangunan telah memberikan penerangan di depan bangunannya.
- h. Tertib sosial dengan indikator sebagai berikut:
 1. Tidak terdapat kegiatan prostitusi di lingkungannya; dan
 2. Tidak terdapat kegiatan perjudian dan minuman beralkohol.
- i. Tertib penyelenggaraan kesehatan dengan indikator sebagai berikut:
 1. Tidak terdapat praktek pengobatan tanpa izin dilingkungannya; dan
 2. Tidak terdapat jasa pengobatan tradisional tanpa izin dilingkungannya.
- j. Tertib kawasan tanpa rokok dengan indikator sebagai berikut:
 1. Tidak merokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok; dan
 2. Telah memasang larangan merokok di tempat-tempat umum.
- k. Tertib administrasi dengan indikator sebagai berikut:
 1. Adanya data linmas
 2. Adanya data tentang pelanggaran peraturan daerah; dan
 3. Adanya peraturan pekon yang mendukung upaya-upaya ketentraman dan ketertiban.

Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 mengatur mengenai tim penilai bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan penilaian pekon tertib dibentuk tim penilai.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
 - e. Dinas Kesehatan
 - f. Dinas Lingkungan Hidup
 - g. Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja: dan
 - h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan koordinasi mengenai teknis penetapan pekon tertib
 - b. Melaksanakan pembinaan pekon tertib
 - c. Melaksanakan penilaian pekon tertib, dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui kepala satuan pamong praja.
- (4) Tim penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati

Pasal 6 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang pengaturan pekon tertib dalam hal penetapan pekon tertib, pekon yang memenuhi unsur sebagai pekon tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 7 Mengatur jangka waktu penghargaan sebagai pekon tertib sebagaimana diatur Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019, penghargaan Pekon Tertib diberikan untuk jangka waktu (tiga) tahun.

Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 yang mengatur dalam hal pembinaan, bahwa pembinaan Pekon Tertib dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9 peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang pengaturan pekon tertib berisi tentang pembiayaan, dalam pembiayaan pelaksanaan Pekon Tertib dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 10 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 menjelaskan ketentuan penutup bahwa:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.⁷⁰

⁷⁰ Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pekon Tertib

DAFTAR RUJUKAN

- A. Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, Bandung: Citra Ditya Bakti, 2004.
- Abidin Zainal Amirullah, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1986.
- Ahmad Sukardja dan Mugar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih dan kanun*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Dapartemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persa, 2011.
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum qa al-Islamiyah*, Kairo: Matba'ah al-Qahirah al-Jadidah.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hadi Sutrisno, *Metode Research Andi Offset*, Yogyakarta, 1990.
- Ibn Mansur, *Lisan al-'Arab*, Juz 6, Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: al-Muassasah al-'Arabiyyah, 2002.
- Imam Amrusi Jailani, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, Alumni: Bandung, 1971.

- Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991.
- Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru 1987.
- Semiawan Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Sopiah Etta Mamang Sanggaadji, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2010.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wirjonno Projodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung: PT.Eresco, 1971.
- Zeni Yusarlis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pekon Tertib

Skripsi

- Desi Tamara, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Fitria, *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima dalam pergub No. 10 tahun 2015*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Jurnal

- Victor Imanuel W. Nalle, *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Katolik Darma Cendika, Vol 46, No 3, 2016.
- I Komang Subagiarta, *Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan kawasan jalur hijau di Kabupaten Klungkung*, Jurnal Ilmiah fakultas hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Vol. 1, No 2, 2020.
- Riska Destianita “*Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan dan gelandangan di Kota Samarinda (studi kasus larangan memberi uang kepada anak jalanan dan pengemis)*”, eJurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Vol. 8, No.2, 2020

Toha Ansiko, *Pemberdayaan Qaw'aid fihiyyah dalam penyelesaian masalah-masalah fikih siyasah modern, jurnal al-adalah*, Bandar Lampung: Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Vol. 12, No. 1, 2014, (2019), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/32>.

Wawancara

Alyasir, *Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Barat 2017-2022*, (Lampung Barat: Dokumentasi, 2018).

_____, Upaya Peningkatan Pelayanan pemeliharaan Masyarakat, *Wawancara*, Mey 4, 2021.

Aprizal Bhabinkamtibnas dan Heriyadi Babinsa Pekon Way Empulau Ulu, “Pelanggaran Pada Pasal 4 Ayat 2 Huruf A Tertib Pelaksanaan Siskamling” , *Wawancara*, May 4, 2021.

Asri, “Pelanggaran pada Pasal 4 Ayat 2 Huruf C Tertib Saluran Hijau, Taman Kota Dan Tempat Umum”, *Wawancara*, Mey 4, 2021.

Barata Yudi Yuniardi, “Pelanggaran pada Pasal 4 Ayat 2 Huruf B Tertib Pemanfaatan Dan Angkutan Jalan”, *Wawancara*, Mey 4, 2021.

Barzawan Peratin Way Empulau Ulu, “Tertib Kawasan Bebas Rokok”, *Wawancara*, Nopember 22, 2021.

Dian Novita Kasi Keamanan Lingkungan, “Pelayanan Satpol PP”, *Wawancara*, 4 Mey 2021.

Ediyansyah, “Upaya Peningkatan Pelayanan pemeliharaan Masyarakat” *Wawancara*, Mey 4, 2021.

Ezpin Inoni, sebagai Kasi Teknis Pemberdayaan Pekon Way Empulau Ulu “Pelanggaran Sungai” *Wawancara*, December 08, 2021.

Idwar Efendi Kasi Linmas, “Sarana dan Prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Barat”, *Wawancara*, Mey 4, 2021.

Mareza Rendi sebagai Kaur Perencanaan Pekon Way Empulau Ulu, “ Tertib Bangunan dan Penghuni Bangunan’ , *Wawancara*, December 08, 2021.

Mujiran Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat “Jumlah Anggota Bidang Linmas”, *Wawancara*, Mey 4, 2021.

R. Ariadi, “Pelanggaran Pada Pasal 4 Ayat 2 Huruf J Tertib Kawasan Tanpa Bebas Rokok”, *Wawancara*, Mey 4, 2021.

Reka Anita sebagai Bidan Pekon Way Empulau Ulu, “Tertib Penyelenggaraan Kesehatan” , *Wawancara*, December 08, 2021.

Sapto Putranto Nugroho, “Beberapa Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Secara Bertahap dalam Penerapan Pekon Tertib”, *Wawancara*, May 24, 2021.

Septiani “Pendekatan-Pendekatan Pembinaan Pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barar Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pekon Tertib”, *Wawancara*, May 4, 2021.

Septina “ Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum”, *Wawancara*, May 4, 2021.

Tamadun Islami “Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Barat”, *Wawancara*, May 4, 2021.

Wirdan selaku Kasi Teknis Pembangunan, “Pelanggaran pada Pasal 4 Ayat 2 Huruf F dan G terhadap Tertib Bangunan dan Penghuni Bangunan”, *Wawancara*, Mey 4, 2021

Dokumentasi

Dokumentasi Profil Desa Way Empulau UluKec. Balik Bukit Lampung Barat

Dokumentasi Gambaran Umum dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat

Sumber Online

Rakhmad Zailani Kiki, “Islam dan Tertib Hunian”, Republika.co.id, 2016,

<https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/02/19/o2s0g717-islam-dan-tertib-hunian>

Satpol PP Lambar, “Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol.PP) Kabupaten Lampung

Barat”, *[https://www.polpplampungbarat.com/2015/09/sejarah-pembentukan-satuan-](https://www.polpplampungbarat.com/2015/09/sejarah-pembentukan-satuan-polisi.html?m=1)*

[polisi.html?m=1](https://www.polpplampungbarat.com/2015/09/sejarah-pembentukan-satuan-polisi.html?m=1)

